

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DILIHAT DARI ASPEK KOMUNIKASI PADA KANTOR DESA WAYAU KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN TABALONG

Hani Aditya*, Rahmi Hayati

haniadityaaaaa0311@gmail.com, rahmihayati777@gmail.com

Program Studi Administrasi Negara
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong
Komplek Stadion Olahraga Sarabakawa, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Telp./Fax 05262022484,
Kode Pos 71571. Email: info@stiatabalong.ac.id

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan permasalahan yang masih dihadapi di Indonesia. Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan individual atau kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk sehari-hari, baik kondisi fisik maupun kondisi ekonomi. Kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya yaitu Sumber Daya Manusia yang kurang memadai. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui dan menganalisa bagaimanakah Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dilihat Dari Aspek Komunikasi Pada Kantor Desa Wayau Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan Deskriptif Kualitatif. Sumber data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kepada pendamping BPNT, kasi kesejahteraan rakyat, masyarakat penerima BPNT berjumlah tiga orang. Berdasarkan dari hasil penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Pada Aspek Komunikasi sudah terimplementasi.

Kata Kunci : Implementasi, Program, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

IMPLEMENTATION OF THE NON-CASH FOOD ASSISTANCE PROGRAM (BPNT) VIEWED FROM THE COMMUNICATION ASPECT AT THE WAYAU VILLAGE OFFICE, TANJUNG DISTRICT, TABALONG REGENCY

ABSTRACT:

Poverty remains a significant issue in Indonesia. It is a condition where individuals or groups are unable to meet their daily living needs, both physically and economically. Several factors contribute to poverty, one of which is the inadequacy of human resources. The purpose of this study is to understand and analyze the Implementation of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) Viewed from the Communication Aspect at the Wayau Village Office, Tanjung District, Tabalong Regency. This research employs a descriptive qualitative approach. Primary data were obtained through observations and interviews with BPNT assistants, the head of public welfare, and three BPNT beneficiaries. Based on the findings of this study, it can be concluded that the implementation of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) in terms of communication has been successfully implemented.

Keywords: Implementation, Program, Non-Cash Food Assistance (BPNT)

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan yang masih dihadapi di Indonesia. Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan individual atau kelompok masyarakat dalam

memenuhi kebutuhan hidupnya untuk sehari-hari, baik kondisi fisik maupun kondisi ekonomi. Kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya yaitu sumber daya manusia yang kurang memadai. Hal ini, karena masyarakat miskin

cenderung memiliki pendidikan yang sangat rendah, sehingga tidak mampu bersaing dengan yang lainnya sehingga berakibat terjadinya pengangguran.

Dalam menghadapi persoalan kemiskinan, peran pemerintah sangat diperlukan, mengingat kebijakan dan peraturan yang dibuat menjadi acuan atau pedoman dalam mendorong ke arah pembangunan. Program-program mengenai pengentasan kemiskinan, di mulai oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016, tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, yaitu bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan perlu adanya dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu dalam hal pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaran kebijakan penanggulangan kemiskinan. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan program program yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan tentang kemiskinan. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Indonesia. Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin salah satunya melalui program beras subsidi.

Sesuai dengan peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 63 tahun 2017 tentang penyaluran Bantuan pangan non tunai (BPNT), yang mengatur tentang program lanjutan dari bantuan sosial beras sejahtera (Bansos Rasta) dimana pemerintah hanya memberikan beras 10 kilogram per keluarga penerima manfaat (KPM). Kemudian program bantuan pangan non tunai tersebut dituangkan dan diatur dalam peraturan Menteri sosial RI Nomor 11 Tahun 2018 dan penyempurnaan pada peraturan Menteri nomor 20 Tahun 2019 tentang bantuan pangan non tunai, bantuan yang diberikan pemerintahan berupa program voucher pangan yang dapat digunakan untuk menebus dan membeli berbagai bahan pokok seperti beras, telur, tempe, dan lainnya diwarung, took atau agen khusus yang diberi nama e-warong yang bekerja sama dengan bank penyalur dan memiliki mesin EDC. Program ini sebagai upaya meningkatkan akses dalam memenuhi hak dasar masyarakat miskin terhadap kebutuhan pangan. Dengan adanya reformasi ini, masyarakat yang belum sejahtera akan memiliki

lebih banyak pilihan untuk membeli sembako dengan kualitas yang lebih baik serta memperoleh nutrisi yang lebih seimbangan. Bantuan pangan non tunai (BPNT) ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran KPM (keluarga penerima manfaat) melalui pemenuhan sebagai kebutuhan pangan, memberikan nutrisi yang lebih seimbangan kepada KPM (keluarga penerima manfaat), meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi KPM (keluarga penerima manfaat), memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM (keluarga penerima manfaat) dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

Kemudian menindak lanjuti Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang program Bantuan Non Tunai (BPNT), dikeluarkan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 12 Tahun 2018 tentang Belanja Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Bagi masyarakat Berpendapatan Rendah, maka program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diterapkan di semua desa di seluruh Kabupaten Tabalong salah satunya di Desa Wayau Kecamatan Tanjung. Pada Desa Wayau Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dilaksanakan oleh Sekertaris Desa Bersama dengan Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat (Kasi Kesra) dan pendamping Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta dibantu oleh Ketua RT setempat.

Berdasarkan hasil observasi sementara, ada sebagian masyarakat mengatakan bahwa Implementasi Program Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Wayau Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong sudah terlaksana dengan baik, namun ada juga sebagian masyarakat yang mengatakan Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai belum terlaksana dengan baik. Implementasi tersebut dilihat dari teori implemementasi George C. Edward III, terdapat 4 variabel yang menentukan keberhasilan Implementasi suatu kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pada implementasi program bantuan pangan non tunai dilihat dari aspek disposisi pada indikator staff, informasi, wewenang, dan fasilitas sudah baik. Kemudian implementasi program bantuan pangan non tunai dilihat dari aspek

disposisi pada indikator pengangkatan birokrat dan insentif sudah baik. Dan implementasi program bantuan non tunai dilihat dari aspek struktur birokrasi pada indikator standar operasional prosedur dan fragmentasi sudah optimal. Namun pada implementasi program bantuan non tunai dilihat dari aspek komunikasi, terdapat keluhan masyarakat tentang informasi mekanisme Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang disampaikan oleh petugas belum memberikan kejelasan dan konsistensi karena penyampaian informasi berbelit-belit, materi edukasi yang disampaikan terdapat istilah dan singkatan-singkatan yang asing bagi masyarakat, informasi waktu dan tempat pelaksanaan edukasi dan sosialisasi program yang sering berubah-ubah, serta waktu penyaluran dana dan jenis barang yang disediakan sering berubah-ubah. Sehingga masih banyak belum mengerti dan menyebabkan kebingungan tentang mekanisme Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dilihat Dari Aspek Komunikasi Pada Kantor Desa Wayau Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong”

TINJAUAN PUSTAKA

Hasil Penelitian Terdahulu

(Azizah, 2019) melakukan penelitian tentang “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Melalui E-Warung Di Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin” berdasarkan dari hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Melalui E-Warung di Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin sudah terlaksana dengan baik. Dalam pendistribusian program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui E-warung sudah cukup optimal dan tepat sasaran, dan pihak kelurahan selalu berkoordinasi kepada pihak dinas sosial yang sekaligus juga pelaksana dan program tersebut sehingga sejauh ini program tersebut bisa dianggap berhasil untuk membantu warga miskin yang ada di kelurahan alalak selatan.

(Anwar, 2020) melakukan penelitian tentang “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu” berdasarkan dari hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa Karakteristik Program dalam Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dinilai sudah tepat sasaran karena Sumber Daya Manusia di Kelurahan Sisir dirasa sudah memenuhi tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah dicantumkan.

(Anggi Anggrayni, 2019) melakukan penelitian tentang “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui E-Warung di Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu” berdasarkan dari hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Rantau Utara ini dilihat dari teori implementasi menurut Merille S. Grindle yaitu dari aspek isi kebijakan dan dari aspek lingkungan kebijakan belum berjalan dengan baik. Selain itu juga dilihat dari indikator keberhasilan Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu 6T (6 Tepat), dimana 6T ini sangat menentukan kesuksesan suatu Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu. Dari Indikator 6T bahwa pada kenyataan di lapangan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini ada dua indikator yang tidak memenuhi yaitu tepat sasaran dan tepat waktu. Kendala-Kendala yang dihadapi dalam Implementasi Bantuan. Pangan Non Tunai (BPNT) adalah rendahnya pengetahuan masyarakat tentang program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan rendahnya tingkat kepatuhan implementor yang disebabkan kurangnya pengawasan dari pemerintah.

(Eriyanti, 2019) melakukan penelitian tentang “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Kuranji Kota Padang” berdasarkan dari hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) belum berjalan dengan baik.

(Mulyadi, 2019) melakukan penelitian tentang “Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai Di Kelurahan Cikondang Kecamatan

Citamiang Kota Sukabumi” berdasarkan dari hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini belum berjalan sesuai dengan aturan karena dapat dilihat dan ukuran dan tujuan kebijakan yang belum tercapai, jumlah sumber daya manusia yang masih kurang, karakteristik pelaksana yang tidak mengetahui adanya aturan mengenai Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan tidak adanya komunikasi antar dinas terkait Saran peneliti yaitu agar para pelaksana kebijakan mengetahui mengenai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 agar pelaksanaan program ini dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pengertian Implementasi

Menurut Van Matter & Van Horn implementasi adalah pelaksanaan tindak oleh individu, pejabat, instansi pemerintah, maupun kelompok swasta dengan tujuan untuk menggapai cita-cita yang telah digariskan dalam keputusan tertentu. Sedangkan menurut Mazmanian & Sabatier implementasi yaitu pelaksanaan dari kebijakan dasar hukum juga berbentuk perintah keputusan, atau keputusan pengadilan. Proses pelaksanaannya berlangsung setelah jumlah tahap.

Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye (Edi Suharto, 2005) kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan dan apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objeknya) karena kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja Disamping itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijaksanaan negara Hal ini disebabkan karena sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pangaruh (dampak) yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.

Menurut Easton kebijakan publik diartikan pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya meningkat.

Sedangkan menurut Chandler dan Plano (Leo Agustino, 2015) Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-

masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Pengertian Komunikasi

Menurut Bernard Berelson & Gary A Steiner (Deddy Mulyana, 2018) menyatakan bahwa komunikasi merupakan sebuah tindakan atau proses transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan semacamnya hal yang di transmisikan ini dapat berupa simbol-simbol, kata-kata, gambar, figur, grafik dan semacamnya.

Sedangkan menurut Hovland, Janis & Kelley komunikasi merupakan suatu proses dimana seseorang (komunikator) menyampaikan stimulus (biasanya dalam bentuk kata-kata) dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lain (khalayak).

Model Implementasi Kebijakan

Model implementasi kebijakan menurut George C. Edward III adalah model implementasi kebijakan yang berperspektif top down dikembangkan oleh George C. Edward III menambahkan model implementasi kebijakan publiknya dengan *direct an indirect impact on implementation*. Dalam (Leo Agustino, 2015) terdapat empat variabel yang sangat menentukan suatu keberhasilan implementasi kebijakan yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi

Model implementasi kebijakan menurut Van Mater dan Van Horn mengatakan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dan kebijakan publik implementor dan kinerja kebijakan publik. Menurut Van Mater dan Van Horn dalam (Nugroho, 2008) terdapat enam variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik yaitu:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumberdaya
3. Karakteristik agen pelaksana
4. Sikap/kecenderungan (*Desposition*) para pelaksana
5. Komunikasi antar organisasi
6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Model implementasi kebijakan menurut Merline S. Grindle (Subarsono, 2005) terdapat dua variabel besar yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu isi kebijakan (*content of policy*)

dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Masing-masing variabel tersebut masih dipecah lagi menjadi beberapa item. Isi variabel kebijakan ini mencakup:

1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target grup termuat
2. Jenis manfaat yang diterima oleh target grup
3. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan
4. Apakah letak sebuah program sudah tepat
5. Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup:

1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan
2. Karakteristik instusi dan rezim yang sedang berkuasa
3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran

Keunikan dan model Grindle terletak pada pemahamannya yang koperhensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi. Serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

Tinjauan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Pengertian Program

Jhon L. Herman dalam (Purwanto, 2020) mengemukakan definisi program sebagai segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh.

(Hasibuan, 2008) juga mengungkapkan bahwa program adalah suatu jenis rencana yang jelas dan konkret karena didalamnya sudah tercantum sasaran kebijaksanaan, prosedur, anggaran, dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan.

Pengertian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Menurut peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2019 tentang Bantuan Pangan Non Tunai yang selanjutnya disingkat BPNT adalah bantuan sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui uang elektronik, selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan e-warong.

Tujuan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

1. Mengurangi beban pengeluaran KPM BPNT melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan
2. Memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada KPM BPNT
3. Memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi.
4. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM BPNT dalam memenuhi kebutuhan pangan

Manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk meningkatkan:

1. Ketahanan pangan di tingkat KPM BPNT sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan
2. Efisiensi penyaluran bantuan sosial
3. Akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan
4. Transaksi nontunai
5. Pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil dibidang perdagangan

Syarat Mengikuti Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

1. Nama pengurus KPM (pemilik rekening)
2. NIK pengurus KPM
3. KTP-el pengurus KPM atau surat keterangan (suket) pengganti KTP-el sementara
4. Tempat lahir pengurus KPM
5. Tanggal lahir pengurus KPM
6. Nama gadis ibu kandung dari pengurus KPM

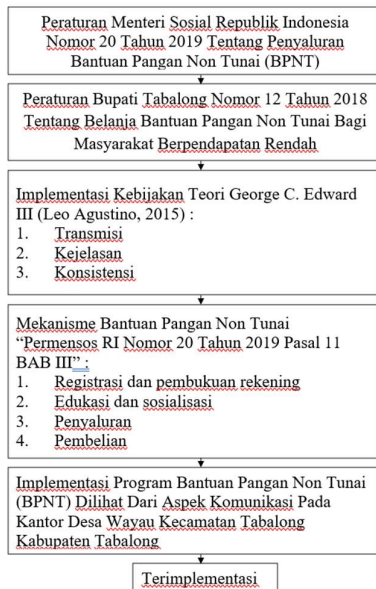
Mekanisme Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Menurut peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2019 tentang penyaluran pendaftaran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Mekanisme penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terdiri dari:

1. Registrasi dan/atau pembukuan rekening
2. Edukasi dan sosialisasi
3. Penyaluran, dan
4. Pembelian barang

Kerangka Konseptual

Gambar 1 : Kerangka Konseptual



Sumber Data : Diolah Peneliti (2024)

METODE PENELITIAN

Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimanakah Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dilihat Dari Aspek Komunikasi Pada Kantor Desa Wayau Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Menurut (Martono N. , 2010) penelitian deskriptif merupakan tipe penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan sebuah karakter suatu variabel kelompok atau gejala sosial yang sedang terjadi di tengah masyarakat. Sedangkan pendekatan Kualitatif menurut (Sugiyono, 2017) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positivism*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci.

Sumber Data

Data adalah kumpulan informasi berupa catatan kejadian atau penemuan lapangan atau informasi yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian yang terjadi. Menurut (Moleong, 2017) Data merupakan sekumpulan informasi, yang berupa informasi atau angka hasil pencatatan suatu kejadian atau sekumpulan

informasi yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian. Data yang mampu menjawab masalah penelitian adalah data yang berasal dari sumber-sumber yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Sumber dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer dalam proses penelitian didefinisikan sebagai sekumpulan informasi yang diperoleh peneliti langsung dari lokasi penelitian melalui Sumber data pertama (responden atau informan, melalui wawancara) atau melalui hasil pengamatan yang dilakukan sendiri oleh peneliti (Martono N. , 2010) Contoh Data yang pokok/data primer itu seperti buku-buku dan literatur.

2. Data Sekunder

Sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur, dan bacaan yang berkaitan dan menunjang penelitian (Sugiyono, 2017)

Metode Pengumpulan Data

Agar data yang diperoleh valid dan mampu menjawab pertanyaan pertanyaan maupun permasalahan-permasalahan penelitian serta mampu mencapai tujuan penelitian, maka ditentukan teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti. Dalam pelaksanaan observasi (partisipasi observasi) ialah penelitian melakukan pengamatan secara langsung dalam waktu sementara menjadi orang dalam atau menjadi dari komunikasi yang berobservasi atau diteliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung (Pasolong, 2010). Melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Teknik yang digunakan adalah wawancara terstruktur dengan maksud agar narasumber

dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan kebutuhan peneliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambaran, karya-karya monumental seseorang. Pengumpulan data dengan jalan melihat, membaca, mempelajari, kemudian mencatat data yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

Analisis Data

Analisis data dalam Penelitian kualitatif menghasilkan data dalam bentuk rekaman wawancara, transkrip wawancara, catatan hasil pengamatan, dokumen-dokumen tertulis, serta catatan-catatan lain yang tidak terekam selama pengumpulan data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Data Kualitatif yang dikembangkan (Matthew B. Milles, 2014) yang menggunakan metode analisis interaktif dengan prosedur sebagai berikut:

1. Seleksi Data (*Data Collection*)

Seleksi data adalah proses pengumpulan, pengukuran dan analisis berbagai tipe informasi menggunakan teknik berstandar. Tujuan utama *data collection* adalah untuk mengumpulkan informasi dan data terpercaya sebanyak-banyaknya yang kemudian dianalisis untuk membuat sebuah keputusan bisnis dan krusial.

2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan final dapat diambil dan diverifikasi. Kondensasi mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyerderhanaan, pengabstrakan, atau mentransformasikan data secara utuh yang diperoleh dari data lapangan, transkrip wawancara, dokumen dan bahan empiris lainnya.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

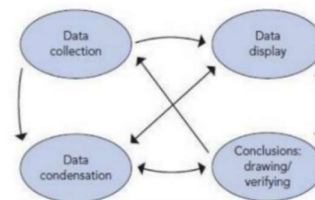
Secara umum penyajian data adalah sebuah bentuk kumpulan data yang terorganisir, informasi, yang memungkinkan menggambarkan kesimpulan dan

tindakan. Penyajian data adalah langkah utama yang kuat untuk menganalisis data secara kualitatif. Menyajikan data mencakup banyak jenis matriks, grafik, diagram, dan jaringan. Semua dirancang untuk mengumpulkan informasi yang terorganisir menjadi bentuk yang dapat diakses, sehingga analisis dapat melihat apa yang terjadi dan menarik kesimpulan yang dibenarkan atau melanjutkan ketahap selanjutnya.

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verifying*)

Kegiatan analisis ketiga yang paling penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kegiatan ini dimaksudkan, untuk menampilkan sekumpulan informasi yang telah tersusun sehingga dapat memberikan pemahaman tentang apa yang terjadi dan fenomena yang melingkupinya. Dengan penyajian data diharapkan mampu memberikan adanya kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan selanjutnya.

Gambar 2 : Komponen-komponen Analisis Data Model Kualitatif



Sumber Data : (Matthew B. Milles, 2014)

Untuk memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan, maka peneliti membuat kriteria pengukuran sebagai berikut:

Tabel 1 : Kriteria Pengukuran

No	Kategori	Bobot	Kriteria
1	Sangat Terimplementasi	5	Apabila ke 5 informan menjawab benar
2	Terimplementasi	4	Apabila ke 4 informan menjawab benar

3	Cukup Terimplementasi	3	Apabila ke 3 informan menjawab benar
4	Belum Terimplementasi	2	Apabila ke 2 informan menjawab benar
5	Tidak Terimplementasi	1	Apabila ke 1 informan menjawab benar

Sumber Data : Diolah Peneliti (2024)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil wawancara tersebut serta dari pengamat peneliti, maka peneliti menyimpulkan atau membahas dengan dukungan teori Implementasi Kebijakan yang dikemukakan George C. Edward III dilihat dari aspek Komunikasi, terdiri dari variabel transmisi, kejelasan, dan konsisten menjadi tolak ukur untuk mengetahui dan menganalisa Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dilihat dari aspek komunikasi pada Kantor Desa Wayau Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. Implementasi program bantuan pangan non tunai (BPNT) dilihat dari aspek komunikasi. Yang dikemukakan oleh George C. Edward III, dari indikator:

Transmisi

Implementasi program bantuan pangan non tunai (BPNT), yang dikemukakan oleh George C. Edward III dari indikator transmisi dilihat dari tahap registrasi, maka dapat diketahui bahwa Implementasi program bantuan pangan non tunai (BPNT) dikategorikan sangat terimplementasi. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara kepada lima orang informan. Dapat diketahui semua informan menjawab *“ya/sudah mendapat informasi mengenai kegiatan registrasi”*.

Implementasi program bantuan pangan non tunai (BPNT), yang dikemukakan oleh George C. Edward III dari indikator transmisi dilihat dari tahap pembukaan rekening, maka dapat diketahui bahwa Implementasi program bantuan pangan non tunai (BPNT) dikategorikan sangat terimplementasi. Hal ini dapat dibuktikan dari

hasil wawancara dengan lima orang informan. Dapat diketahui semua informan menjawab *“ya/sudah mendapat informasi mengenai kegiatan pembukaan rekening”*.

Implementasi program bantuan pangan non tunai (BPNT), yang dikemukakan oleh George C. Edward III dari indikator transmisi dilihat dari tahap edukasi, maka dapat diketahui bahwa Implementasi program bantuan pangan non tunai (BPNT) dikategorikan sangat terimplementasi. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan lima orang informan. Dapat diketahui semua informan menjawab *“ya/sudah mendapat informasi mengenai edukasi program BPNT”*.

Implementasi program bantuan pangan non tunai (BPNT), yang dikemukakan oleh George C. Edward III dari indikator transmisi dilihat dari tahap sosialisasi, maka dapat diketahui bahwa Implementasi program bantuan pangan non tunai (BPNT) dikategorikan sangat terimplementasi. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan lima orang informan. Dapat diketahui semua informan menjawab *“ya/sudah mendapat informasi mengenai sosialisasi program BPNT”*.

Implementasi program bantuan pangan non tunai (BPNT), yang dikemukakan oleh George C. Edward III dari indikator transmisi dilihat dari tahap penyaluran dana, maka dapat diketahui bahwa Implementasi program bantuan pangan non tunai (BPNT) dikategorikan sangat terimplementasi. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan lima orang informan. Dapat diketahui semua informan menjawab *“ya/sudah mendapat informasi mengenai penyaluran dana”*.

Implementasi program bantuan pangan non tunai (BPNT), yang dikemukakan oleh George C. Edward III dari indikator transmisi dilihat dari tahap pembelian barang, maka dapat diketahui bahwa Implementasi program bantuan pangan non tunai (BPNT) dikategorikan sangat terimplementasi. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan lima orang informan. Dapat diketahui semua informan menjawab *“ya/sudah mendapat informasi mengenai pembelian barang”*.

Kejelasan

Implementasi program bantuan pangan non tunai (BPNT), yang dikemukakan oleh George C. Edward III dari indikator kejelasan dilihat dari tahap registrasi, maka dapat diketahui bahwa Implementasi program bantuan pangan non tunai (BPNT) dikategorikan cukup terimplementasi. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan lima orang informan. Dapat diketahui ada tiga orang menjawab *“ya/sudah jelas”* dan dua orang menjawab *“belum jelas mengenai informasi registrasi”*.

Implementasi program bantuan pangan non tunai (BPNT), yang dikemukakan oleh George C. Edward III dari indikator kejelasan dilihat dari tahap pembukaan rekening, maka dapat diketahui bahwa Implementasi program bantuan pangan non tunai (BPNT) dikategorikan cukup terimplementasi. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan lima orang informan. Dapat diketahui ada tiga orang menjawab *“ya/sudah jelas”* dan dua orang menjawab *“belum jelas mengenai informasi pada pembukaan rekening”*.

Implementasi program bantuan pangan non tunai (BPNT), yang dikemukakan oleh George C. Edward III dari indikator kejelasan dilihat dari tahap edukasi, maka dapat diketahui bahwa Implementasi program bantuan pangan non tunai (BPNT) dikategorikan cukup terimplementasi. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan lima orang informan. Dapat diketahui ada tiga orang menjawab *“ya/sudah jelas”* dan dua orang menjawab *“belum jelas mengenai tahap edukasi”*.

Implementasi program bantuan pangan non tunai (BPNT), yang dikemukakan oleh George C. Edward III dari indikator kejelasan dilihat dari tahap sosialisasi, maka dapat diketahui bahwa Implementasi program bantuan pangan non tunai (BPNT) dikategorikan cukup terimplementasi. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan lima orang informan. Dapat diketahui ada tiga orang menjawab *“ya/sudah jelas”* dan dua orang menjawab *“belum jelas mengenai informasi sosialisasi”*.

Implementasi program bantuan pangan non tunai (BPNT), yang dikemukakan oleh George C. Edward III dari indikator kejelasan dilihat dari

tahap penyaluran dana, maka dapat diketahui bahwa Implementasi program bantuan pangan non tunai (BPNT) dikategorikan cukup terimplementasi. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan lima orang informan. Dapat diketahui ada tiga orang menjawab *“ya/sudah jelas”* dan dua orang menjawab *“belum jelas mengenai informasi penyaluran dana”*.

Implementasi program bantuan pangan non tunai (BPNT), yang dikemukakan oleh George C. Edward III dari indikator kejelasan dilihat dari tahap pembelian barang, maka dapat diketahui bahwa Implementasi program bantuan pangan non tunai (BPNT) dikategorikan cukup terimplementasi. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan lima orang informan. Dapat diketahui ada tiga orang menjawab *“ya/sudah jelas”* dan dua orang menjawab *“belum jelas mengenai tahap pembelian barang”*.

Konsistensi

Implementasi program bantuan pangan non tunai (BPNT), yang dikemukakan oleh George C. Edward III dari indikator konsisten dilihat dari tahap registrasi, maka dapat diketahui bahwa Implementasi program bantuan pangan non tunai (BPNT) dikategorikan terimplementasi, Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan lima orang informan. Dapat diketahui ada empat orang menjawab *“ya/sudah konsisten”* dan satu orang menjawab *“belum konsisten mengenai informasi pada tahap registrasi”*.

Implementasi program bantuan pangan non tunai (BPNT), yang dikemukakan oleh George C. Edward III dari indikator konsisten dilihat dari tahap pembukaan rekening, maka dapat diketahui bahwa Implementasi program bantuan pangan non tunai (BPNT) dikategorikan terimplementasi, Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan lima orang informan. Dapat diketahui ada empat orang menjawab *“ya/sudah jelas”* dan satu orang menjawab *“belum jelas mengenai informasi pada tahap pembukaan rekening”*.

Implementasi program bantuan pangan non tunai (BPNT), yang dikemukakan oleh George C. Edward III dari indikator konsisten dilihat dari tahap edukasi, maka dapat diketahui bahwa Implementasi program bantuan pangan non tunai

(BPNT) dikategorikan cukup terimplementasi, Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan lima orang informan. Dapat diketahui ada tiga orang menjawab *“ya/sudah konsisten”* dan dua orang menjawab *“belum konsisten mengenai informasi pada tahap edukasi”*.

Implementasi program bantuan pangan non tunai (BPNT), yang dikemukakan oleh George C. Edward III dari indikator konsisten dilihat dari tahap sosialisasi, maka dapat diketahui bahwa Implementasi program bantuan pangan non tunai (BPNT) dikategorikan cukup terimplementasi, Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan lima orang informan. Dapat diketahui ada tiga orang menjawab *“ya/sudah konsisten”* dan dua orang menjawab *“belum konsisten mengenai informasi pada tahap sosialisasi”*.

Implementasi program bantuan pangan non tunai (BPNT), yang dikemukakan oleh George C. Edward III dari indikator konsisten dilihat dari tahap penyaluran dana, maka dapat diketahui bahwa Implementasi program bantuan pangan non tunai (BPNT) dikategorikan cukup terimplementasi, Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan lima orang informan. Dapat diketahui ada tiga orang menjawab *“ya/sudah konsisten”* dan dua orang menjawab *“belum konsisten mengenai informasi pada tahap penyaluran dana”*.

Implementasi program bantuan pangan non tunai (BPNT), yang dikemukakan oleh George C. Edward III dari indikator konsisten dilihat dari tahap pembelian barang, maka dapat diketahui bahwa Implementasi program bantuan pangan non tunai (BPNT) dikategorikan cukup terimplementasi, Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan lima orang informan. Dapat diketahui ada tiga orang menjawab *“ya/sudah konsisten”* dan dua orang menjawab *“belum konsisten mengenai informasi pada tahap pembelian barang”*.

Pembahasan

Dari hasil jawaban wawancara tersebut serta dari pengamat peneliti, maka peneliti menyimpulkan atau membahas dengan dukungan teori George C. Edward III yang menjadi tolak ukur untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Program Bantuan Pangan Non

Tunai (BPNT) Dilihat Dari Aspek Komunikasi Pada Kantor Desa Wayau Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, sebagai berikut:

Transmisi

Penyaluran informasi terhadap tahap registrasi, pembukaan rekening, maka diketahui bahwa Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sudah sangat terimplementasi. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan lima informan bahwa informasi mengenai adanya Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Wayau dan mekanisme program sudah disalurkan kepada masyarakat yang menerima bantuan tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Azizah, 2019), (Anwar, 2020) yang kesimpulannya adalah Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sudah berjalan dengan baik.

Kejelasan

Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dilihat dari aspek komunikasi yang dikemukakan oleh George C. Edward III, dari indikator kejelasan terhadap tahap registrasi, pembukaan rekening, edukasi, sosialisasi, penyaluran dana, serta pembelian barang, maka diketahui bahwa Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) cukup terimplementasi. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dilakukan dengan informan yang sebagian mengatakan bahwa komunikasi yang diberikan mengenai pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sudah jelas dan sebagian kurang jelas karena penyampaian informasi registrasi dan pembukaan rekening berbelit-belit, materi edukasi dan sosialisasi yang disampaikan menggunakan singkatan dan istilah asing yang sulit dipahami, serta adanya perbedaan informasi penyaluran dana dan pembelian barang sehingga terjadi bias di masyarakat mengenai Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Anggi Anggrayni, 2019), (Mulyadi, 2019), (Eriyanti, 2019), yang kesimpulannya adalah Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.

Konsisten

Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dilihat dari aspek komunikasi yang dikemukakan oleh George C. Edward III, dari indikator konsistensi terhadap tahap registrasi, pembukaan rekening, edukasi, dan sosialisasi, penyaluran dana, serta pembelian barang, maka diketahui bahwa Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai cukup terimplementasi. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa sebagian informan merasa komunikasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) belum konsisten, terdapat kendala pada waktu pelaksanaan registrasi yang tidak pasti, penyerahan Kartu Keluarga Sejahtera yang tidak pasti, dan tahap pembelian barang pada e-warong yang menyediakan barang berubah-ubah setiap bulannya dan tidak sesuai dengan barang yang dibutuhkan oleh KPM. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan (Anggi Anggrayni, 2019), (Eriyanti, 2019), (Mulyadi, 2019) yang kesimpulannya adalah Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.

Berdasarkan hasil pembahasan di atas menunjukkan bahwa mengenai Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dilihat dari aspek komunikasi dan indikator transmisi dikategorikan sangat terimplementasi, dari indikator kejelasan dikategorikan cukup terimplementasi, dari indikator konsistensi dikategorikan cukup terimplementasi. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dilihat Dari Aspek Komunikasi Pada Kantor Desa Wayau Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong dikategorikan terimplementasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dilihat Dari Aspek Komunikasi Pada Kantor Desa Wayau Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong dikategorikan terimplementasi.

SARAN

Saran-saran atas penelitian ini antara lain :

1. Diharapkan kepada pemerintah Desa Wayau dapat meningkatkan Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) agar menjadi sangat terimplementasi dan baik.
2. Pada mekanisme penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) banyak informasi yang belum memberikan kejelasan, sehingga diharapkan pemerintah Desa dan pendamping BPNT lebih detail, padat, dan jelas dalam menyampaikan informasi kepada keluarga penerima manfaat (KPM).
3. Diharapkan kepada Pemerintah Desa Wayau untuk lebih memperhatikan data keluarga penerima manfaat (KPM) agar dana bantuan masuk ke rekening KPM sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
4. Diharapkan bagi pemerintah Desa dan pendamping program bantuan pangan non tunai (BPNT) untuk lebih memperhatikan agen e-warong agar dapat menyediakan barang yang pasti dan sesuai dengan permintaan keluarga penerima manfaat (KPM).
5. Diharapkan kepada pemerintah Desa Pulau Ku'u dan pendamping program bantuan pangan non tunai (BPNT) untuk lebih berkoordinasi satu sama lain agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggi Anggrayni, S. (2019). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui e-Warong di Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu. *Magister Studi Pembangunan dalam Program Studi Magister Pembangunan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara*, 5-17.
- Anwar, D. P. (2020). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu. *Respon Publik*, 1-7.
- Azizah, A. (2019). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Melalui E-Warung Dikelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. *Doctoral dissertation, Universitas islam kalimantan*

- MABDoctoral dissertation, Universitas islam kalimantan MAB1, 23-35.
- Deddy Mulyana, M. P. (2018). *Ilmu Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Edi Suharto, P. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Eriyanti, F. A. (2019). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Kuranji Kota Padang. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 60-68.
- Hasibuan. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Bumi Aksara.
- Leo Agustino, P. (2015). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Martono. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Martono, N. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif : Analisis isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Matthew B. Milles, A. M. (2014). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Moleong. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. REMAJA ROSDAKARYA.
- Mulyadi, A. (2019). Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai Di Kelurahan Cikondang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi. *Ilmu Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik*, 76-80.
- Nugroho, R. (2008). *Kebijakan Publik*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Purwanto, E. A. (2020). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Bandung: Gava Media.
- Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif : Untuk penelitian yang bersifat : eksploratif, enterperatif, interaktif, dan konstruktif*. Bandung : Alfabeta.